



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

RENCANA STRATEGIS



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Cilacap



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 94 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, sehingga Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Pasal 3

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 JUN 2016



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 JUN 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 94

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2022. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cilacap, Juni 2018



Drs. FARID MA'RUF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196250322 198607 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	9
2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	11
2.1.2 Uraian Tugas.....	13
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap ..	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)	29
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)	30
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019	44
3.4 Telaahan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	48
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis.....	52
3.6 Penentuan isu-isu strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	60
5.1 Strategi	60
5.2 Kebijakan	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	110
BAB VIII PENUTUP.....	115
8.1 Pedoman Transisi.....	115
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang Tahun 2017.....	30
Tabel 2.2.1.1	Jumlah Pejabat Eselon di Lingkungan Sekretariat Daerah Cilacap Tahun 2017	30
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017.....	34
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	40
Tabel 3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Setda Kabupaten Cilacap terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	43
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	46
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	54
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	54
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2022	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2022	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2022	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.....	3
GAMBAR 1.2 Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	12

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor : 94 Tahun 2018
Tanggal : 8 Juni 2018
Tentang : Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Setiap Perangkat Daerah selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Tahun 2017 - 2022 juga menjadi acuan untuk membuat RKPD. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan dan berkaitan dengan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Cilacap.

Dalam rangka mengelola dan mengendalikan perubahan yang terjadi, maka Pemerintahan Daerah harus dapat

menyusun perencanaan daerah yang antisipatif dan visioner berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan adanya perencanaan strategis tersebut, akan membantu Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan.

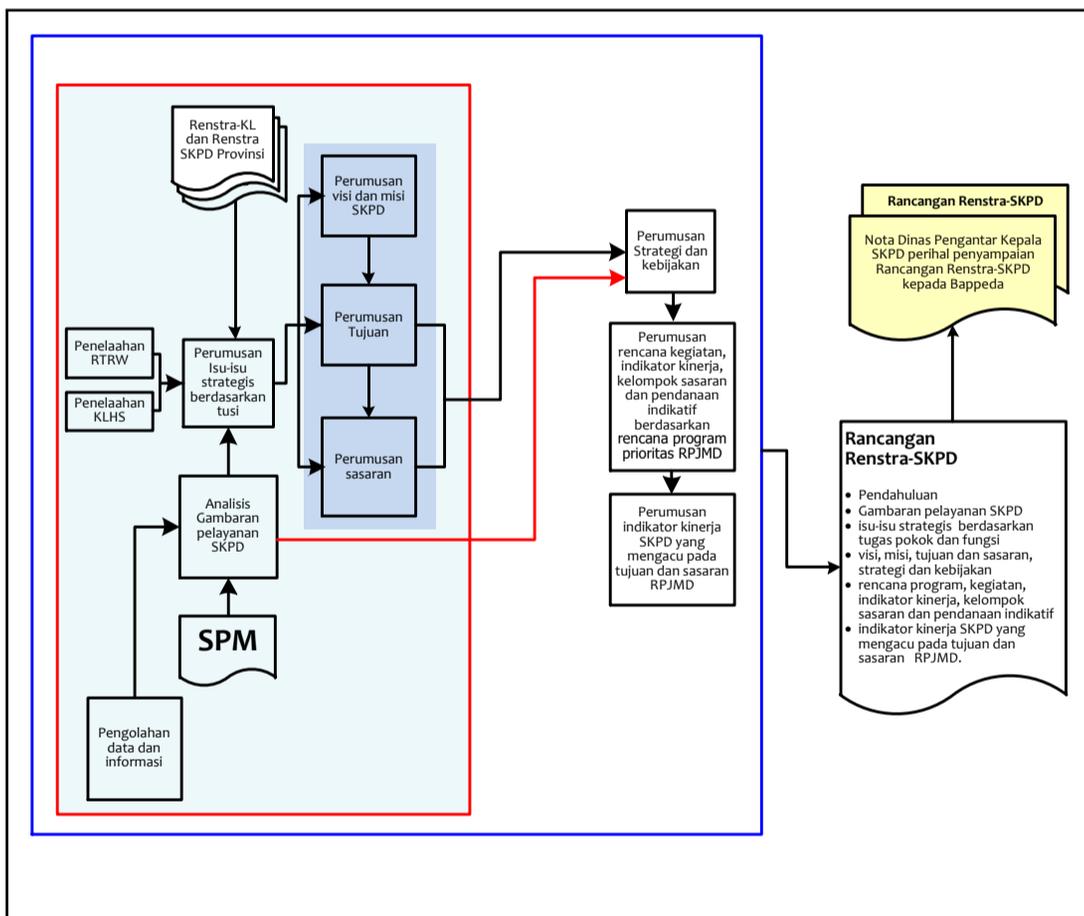
Renstra Setda Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Setda Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Setda Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Setda Kabupaten Cilacap.

Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

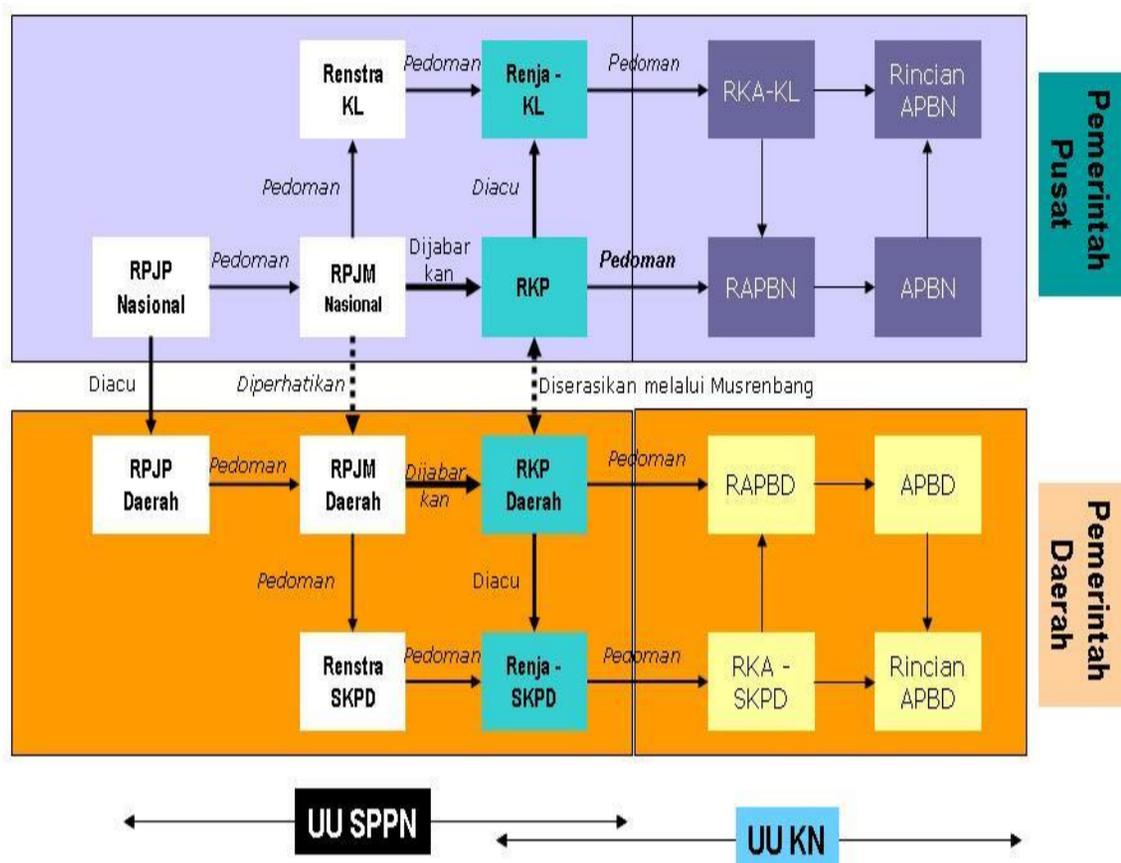
- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Setda Kabupaten Cilacap.
- b) RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022. Selanjutnya Renstra Setda Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Cilacap.

- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap. RKPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
- d) Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Setda Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Setda. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Setda Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap



Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap;

10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi erta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun 2018 tentang Pengesahan Renstra SKPD

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Setda Kabupaten Cilacap sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap.

Adapun tujuan rencana strategis Sekretariat Daerah adalah :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Cilacap, sebagai acuan bagi unit-unit kerja

(Bagian) di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan.

2. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja (renja) Sekretariat Daerah setiap tahun.
3. Sebagai dasar evaluasi kinerja bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja (Bagian) di jajaran Sekretariat Daerah.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Setda Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Setda Kabupaten Cilacap, sumber daya Setda Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan Setda Kabupaten Cilacap, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Setda Kabupaten Cilacap.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang tahun 2017-2022.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SETDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, struktur kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap terdiri dari : Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten Sekda dan 10 (sepuluh) Bagian sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - (b) Sub Bagian Otonomi Daerah
 - (c) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - (b) Sub Bagian Keagamaan dan Kebudayaan
 - (c) Sub Bagian Kemasyarakatan
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - (b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penelaahan Hukum
 - (c) Sub Bagian Perundangan
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Bina Usaha
 - (b) Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal dan BUMD
 - (c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Perencanaan
 - (b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - (c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur
 3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan
 - (b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - (c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
- d. Asisten Administrasi, membawahi :
1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
 - (b) Sub Bagian Pengelolaan Informasi
 - (c) Sub Bagian Protokol
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Kelembagaan
 - (b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 - (c) Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - (b) Sub Bagian Pemeliharaan
 - (c) Sub Bagian Rumah Tangga
 4. Bagian Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Perbendaharaan
 - (b) Sub Bagian Penatausahaan
 - (c) Sub Bagian Aset

Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cilacap.

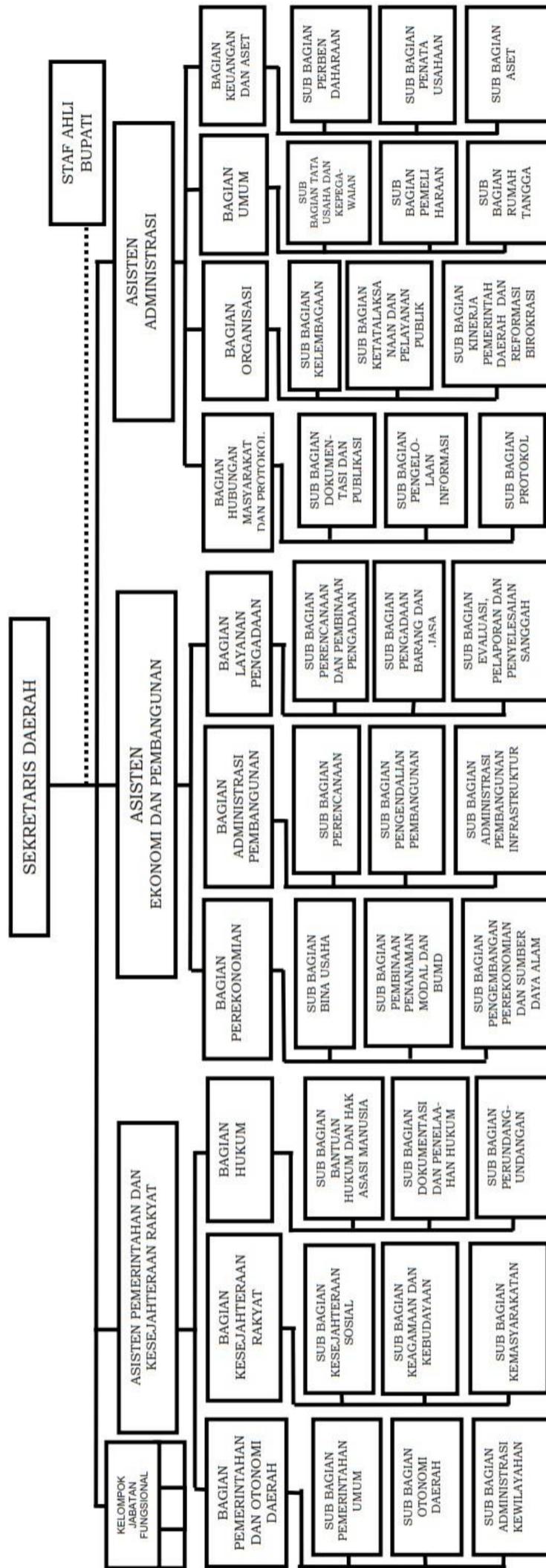
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pembinaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI SETDA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP



2.1.2 URAIAN TUGAS

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Asisten Sekda dan Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;

- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
- 3) pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
- 4) pelayanan administrasi bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;

- 5) pengoordinasian dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Unit Kerja Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan;

- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- g. pengelolaan administrasi bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang kearsipan, bidang perpustakaan;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
 - f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan penelaahan hukum, dan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang hukum yang meliputi bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan penelaahan hukum, dan perundang-undangan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang hukum yang meliputi bantuan

- hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan penelaahan hukum, dan perundang-undangan;
- c. penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang hukum yang meliputi bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan penelaahan hukum, dan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup,

bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. pelayanan administrasi bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan

- permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Unit Kerja Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan meliputi :

1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan, Badan Usaha Milik Daerah dan pengendalian inflasi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;

- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan pengendalian inflasi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan perencanaan Sekretariat Daerah dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah,

- pengendalian pembangunan dan fasilitasi bantuan hibah;
dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Layanan Pengadaan

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, perumusan strategi dan kebijakan, pembinaan administrasi dan Sumber Daya Manusia, fasilitasi layanan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bagian Layanan Pengadaan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan strategi pengadaan barang / jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP;
- e. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. pembinaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. pemberian rekomendasi dan saran terhadap persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, keuangan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- 3) pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- 4) pelayanan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- 5) pengoordinasian dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian Keuangan dan Aset; dan

- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Unit Kerja Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi meliputi :

1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian dan penyelenggaraan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kehumasan dan keprotokolan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang kehumasan dan keprotokolan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan serta pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;
- f. pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan dan

kepegawaian, pemeliharaan aset dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ke tatausahaan Bupati / Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pemeliharaan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan ke tatausahaan Bupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan Bupati / Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. pelayanan administrasi ketatausahaan Bupati / Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, dan kepegawaian, serta pelayanan kerumahtanggaan dan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Keuangan dan Aset

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan penyelenggaraan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah;
- f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA SETDA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah perlu adanya dukungan berbagai sumber daya organisasi baik berupa dana, sarana-prasarana kerja dan sumber daya manusia aparatur yang memadai.

Berdasarkan kondisi yang ada SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dari sisi kuantitas sudah mencukupi. Namun demikian untuk pemberdayaan lebih lanjut masih diperlukan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kompetensinya sesuai kebutuhan. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh ketersediaan, kesiapan dan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola seluruh potensi dan sumber daya organisasi yang tersedia.

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah dan komposisi SDM Aparatur Setda Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang Tahun 2017

PEGAWAI	PENDIDIKAN						GOLONGAN				JML
	SD	SLTP	SLTA	SAR MUD	S1	S2	I	II	III	IV	
PNS	6	11	50	11	76	27	8	50	108	22	188
CPNS											
HARKON	1	1	1								3
HARLOK/WB	2		12		2						16
JUMLAH	9	12	63	11	78	27	8	50	108	22	207

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap keadaan s/d Desember 2017

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pejabat Eselon di Lingkungan Sekretariat Daerah Cilacap Tahun 2017

Tingkatan Eselon/ Jabatan	Jumlah
Eselon II a / Sekda	1
Eselon II b / Asisten Sekda	3
Eselon II b / Staf Ahli Bupati	3
Eselon III a / Kabag	10
Eselon IV a / Kasubag	30
Jumlah	47

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap keadaan s/d Desember 2017

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing pegawai di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Kondisi

sarana-prasarana kerja yang tersebar di masing-masing Sub Unit Organisasi dapat dilihat pada Lampiran.

2.3 KINERJA PELAYANAN SETDA

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012–2017, indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. % daftar rupabumi di tingkat kecamatan
2. Laju Inflasi
3. Tertib penyimpanan dokumen / arsip
4. Publik hearing Perda (% terhadap total Perda)
5. Prosentase peraturan perundang-undangan yang disahkan
6. Pertumbuhan penyaluran kredit untuk UMKM
7. Jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD, LUEP, dsb)
8. Kesesuaian pengelolaan bantuan keuangan kepada desa
9. Kesesuaian pengelolaan dan ketepatan Alokasi Dana Desa
10. Meningkatnya promosi potensi unggulan daerah
11. Dokumen laporan hasil monev APBD
12. Jumlah pegawai / pengelola pengadaan barang / jasa di SKPD
13. Perda SOTK
14. Dokumen standar pelayanan publik (SPM, SP dan SOP)
15. Dokumen LPPD dan EKPPD
16. Nilai EKPPD
17. Dokumen LKPJ
18. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
19. Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa bagi pelaku usaha di bidang industri hasil tembakau

20. Ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup 98 tahun 2012 (% terhadap target yang ditetapkan SPM)
21. Audit ISO 901:2008
22. Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar
23. Jumlah gedung yang terpelihara
24. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara
25. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara
26. Pelayanan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah
27. Bidang tanah yang bersertifikat
28. Data tanah desa
29. Jumlah desa yang tertib administrasi pertanahan
30. Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum
31. Rasio inventarisasi tanah desa
32. Prosentase kasus / permasalahan tanah yang difasilitasi penyelesaiannya
33. Jumlah organisasi kepemudaan
34. Jumlah karang taruna
35. Upacara HUT RI
36. Prestasi Olahraga rangking porda / Porpov Jawa tengah
37. Jumlah kompetisi Olahraga tingkat kabupaten
38. Jumlah kegiatan keagamaan
39. Pelayanan kesekretariatan TP UKS dan KPZ
40. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin
41. Jumlah pegawai yang mengikuti bintek / peningkatan dan skill, knowledge, atitut (SKA)
42. Jumlah kegiatan pelatihan komunikasi dan informasi
43. Update konten website milik Pemkab cilacap (website humas)
44. Jumlah kasus non pidana yang diberikan bantuan dan pendampingan hukum
45. Dokumen evaluasi jabatan, monev tupoksi dan roadmap reformasi birokrasi
46. Dokumen LKjIP, dan dokumen kinerja
47. Nilai AKIP
48. SKPD yang menyusun Dokumen LAKIP, TAPKIN, RKT, IKU
49. Dokumen ASB, SSH, Laporan keuangan dan Laporan mutasi barang

50. Terinformasikannya hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media masa
51. Meningkatnya disiplin pegawai
52. Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian
53. Jumlah asosiasi / lembaga kerjasama antar pemerintah daerah yang diikuti
54. Jumlah PORSENI antar daerah yang diikuti

Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2012-2017 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	% daftar rupabumi di tingkat kecamatan	%	52	55	57	60	62			58	60,75	62			101,75	101,25	99,51
2	Laju Inflasi	%	5,24	5,18	5,16	5,14	5,12	8,37	8,19	2,63	2,77			149,03	146,11		
3	Tertib penyimpanan dokumen / arsip	dokumen	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	100	100	100	100	100
4	Publik hearing Perda (% terhadap total Perda)	%	25	25,8	26,2	26,6	27	26,67	27,3	57	33	31			217,56	100	
5	Prosentase peraturan perundang-undangan yang disahkan	%	42	68	60	70	80			60	65,1			100	93		
6	Pertumbuhan penyaluran kredit untuk UMKM	%	5	5	5	5	5			20	5			400	100		
7	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD, LUEP, dsb)	lembaga	568	568	566	567	568	568	568	566	567	568	100	100	100	100	100
8	Kesesuaian pengelolaan bantuan keuangan kepada desa	dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Kesesuaian pengelolaan dan ketepatan Alokasi Dana Desa	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya promosi potensi unggulan daerah	kegiatan	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	100	100	100	100	
11	Dokumen laporan hasil monev APBD		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
12	Jumlah pegawai / pengelola pengadaan barang dan jasa di SKPD		100	200	150	150	150	100	200	150	150	150	100	100	100	100	100
13	Perda SOTK	Perda	5	5	5	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
14	Dokumen standar pelayanan publik (SPM, SP dan SOP)	dokumen	3	6	3	3	3	3	6	3	3	3	100	100	100	100	100
15	Dokumen LPPD dan EKPPD	dokumen	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	100	100	100	100	100
16	Nilai EKPPD	poin			31	32	33	27.713	30.047	31,98		belum					
17	Dokumen LKPJ	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
18	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	poin	81	81,25	81,5	82	82	78,18	91,31	75,64	75,64	79,05	96,52	112,38	92,81	92,24	96,40
19	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa bagi pelaku usaha di bidang industri hasil tembakau	pelaku usaha	120	175	225	225	225	120	175	225	225	225	100	100	100	100	100
20	Ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup 98 tahun 2012 (% terhadap target yang ditetapkan SPM)	%	87	90	93	95	97	87	90	93	95	97	100	100	100	100	100
21	Audit ISO 901:2008	SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
22	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
23	Jumlah gedung yang terpelihara	buah	1	1	1	1	1	1	1	0,82	1	1	100	100	82	100	100
24	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	buah	24	24	24	38	38	24	24	38	38	38	100	38	158,33	100	100
25	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	buah	26	26	26	41	41	26	26	41	41	41	100	41	157,69	100	100
26	Pelayanan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Bidang tanah yang bersertifikat	m2	237.111	243.461	243.461	248.461	256.311			149	0	0			0,06		
28	Data tanah desa	desa	269	269	269	269	269			2	269	0			0,74	100	
29	Jumlah desa yang tertib administrasi pertanahan	desa	0,2416	0,2491	67	68	69			24	68	0			35,82	100	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
30	Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum	M2	93.630	52.700	52.700	55.000	57.000			41.999	0	0			79,69		
31	Rasio inventarisasi tanah desa	dokumen	1	1	1	1	1			1	1	0			100	100	
32	Prosentase kasus / permasalahan tanah yang difasilitasi penyelesaiannya	kasus	2	3	33	8	4			8	3	0			175,76	162,5	
33	Jumlah organisasi kepemudaan	buah	28	28	32	32	32	28	32	32	32	32	100	100	100	100	100
34	Jumlah karang taruna	buah	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	100	100	100	100	100
35	Upacara HUT RI	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
36	Prestasi Olahraga rangking porda / Porpov Jawa tengah	rank	5	5	5	5	0	0	0	11	0	0					0
37	Jumlah kompetisi Olahraga tingkat kabupaten	kali	29	29	29	29	29	15	18	16	15	20	51,72	62	55	52	69
38	Jumlah kegiatan keagamaan	kegiatan	12	20	11	11	11	12	20	11	11	11	100	100	100	100	100
39	Pelayanan kesekretariatan TP UKS dan KPZ	bulan	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	100	100	100	100	0
40	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin	RTM	140.934	140.934	140.934	140.934	140.934	140.934	140.934	140.934	140.934	140.934	100	100	100	100	100
41	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek / peningkatan dan skill, knowledge, atitut (SKA)	pegawai	396	316	316	431	5	396	316	431	100	5	100	100	136,39	23,2	100
42	Jumlah kegiatan pelatihan komunikasi dan informasi	kegiatan	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100	100	100	100	100
43	Update konten website milik Pemkab cilacap (website humas)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Jumlah kasus non pidana yang diberikan bantuan dan pendampingan hukum	kasus	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	100	100	80	133,33	133,33

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
45	Dokumen evaluasi jabatan, monev tupoksi dan roadmap reformasi birokrasi	dokumen	2	3	4	5	5	2	3	4	5	5	100	100	100	100	100
46	Dokumen LKJIP, dan dokumen kinerja	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
47	Nilai AKIP				60	63	65	44,04	52,05	60,18	63,71	belum					
48	SKPD yang menyusun Dokumen LAKIP, TAPKIN, RKT, IKU	skpd	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	100	100	100	100	100
49	Dokumen ASB, SSH, Laporan keuangan dan Laporan mutasi barang	dokumen	29	29	19	18	17	29	29	19	18	17	100	100	100	100	100
50	Terinformasikannya hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media masa	%	30	40	40	50	60	30	40	40	50	60	100	100	100	100	100
51	Meningkatnya disiplin pegawai	pegawai	230	230	216	216	215	230	230	216	215	215	100	100	100	99,54	100
52	Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	98,6	98,6	99,54	100	100	98,6	98,6	99,54	100
53	Jumlah asosiasi / lembaga kerjasama antar pemerintah daerah yang diikuti	kali	3	3	3	3	3			2					66,67		
54	Jumlah porseni antar daerah yang diikuti	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SETDA KABUPATEN CILACAP

2.4.1. Tantangan

Berbagai tantangan yang ada bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap antara lain yaitu :

- 1) Semakin kuatnya tuntutan *good governance and clean government* dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis berakibat cepatnya perubahan regulasi.
- 3) Kuatnya keinginan masyarakat untuk lebih mendapatkan akses informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didorong pesatnya perkembangan teknologi informasi.
- 4) Kian ketatnya persaingan antar daerah dalam pengembangan potensi daerah.

2.4.2. Peluang

Peluang kedepan bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Cilacap.
- 2) Adanya kesempatan berprakarsa yang luas bagi daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.
- 3) Meningkatnya partisipasi swasta dalam penanganan masalah-masalah pembangunan.
- 4) Tersedianya infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Isu strategis juga mengidentifikasi berbagai potensi yang ada guna dikembangkan menjadi pokok-pokok strategi pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Setda.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SETDA

Sekretariat Daerah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah baik menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah sebagai “*Supporting Unit*” yang harus dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, mendukung kebijakan Bupati dan memfasilitasi kepentingan seluruh lembaga perangkat daerah yang ada sesuai kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki. Sekretariat Daerah juga sebagai “*Supporting Center*” dalam memberikan pelayanan administratif kepada unit-unit kerja yang lain baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati Cilacap dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, Kebijakan yang dirumuskan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Cilacap serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan peran tersebut diperlukan pendukung yaitu

kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya aparatur yang profesional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Masih adanya tumpang tindih tupoksi perangkat daerah.
- b. Masih lemahnya pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- c. Belum optimalnya kinerja ASN.
- d. Belum efektifnya koordinasi antar unit kerja.
- e. Belum efektifnya pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih adanya tumpang tindih tupoksi perangkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum jelasnya tupoksi yang diampu perangkat daerah b. Kurangnya keselarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah c. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah b. Kurangnya kesesuaian pembagian kewenangan dalam tupoksi perangkat daerah c. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis pengampu kegiatan
2.	Masih lemahnya pelaksanaan sistem pengawasan internal.	<ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengawasan aparatur b. Belum efektifnya sistem pengawasan internal yang telah berjalan. c. Kurangnya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku b. Masih minimnya intensitas pengawasan internal c. Sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana secara optimal
3.	Belum optimalnya kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien c. Kapasitas sarana dan prasarana perkantoran belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> dengan tupoksi b. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran.
4.	Belum efektifnya koordinasi antar unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya peran aktif dari unit kerja b. Komunikasi yang tidak lancar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang jelasnya rumusan tugas pokok dan fungsi yang menghambat koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan b. Kurangnya pemahaman unsur terkait mengenai aturan dan kebijakan c. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
5.	Belum efektifnya pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman aparatur mengenai aturan dan kebijakan b. Sulitnya mempertahankan konsistensi keselarasan peraturan perundang-undangan c. Kurang optimalnya pengawalan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang terkait b. Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah c. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang tersusun secara sistematis dan akurat, berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yaitu **“CILACAP SEJAHTERA SECARA MERATA**

(BANGGA MBANGUN DESA). Dalam rangka mewujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
3. Meningkatkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.
5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap terkait dengan misi kedua Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap yaitu :

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan *clean government*”

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka prioritas penyusunan program dan kegiatan Setda Kabupaten Cilacap juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud yang secara operasional akan dijabarkan oleh bagian-bagian di lingkungan Setda Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta

pelayanan administratif. Sekretariat Daerah mempunyai tugas Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari peran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (berbentuk badan dan kantor), lembaga lain serta Pemerintah Kecamatan. Sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah berperan dalam mengkoordinir perumusan berbagai kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang mencakup tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan publik.

Kebijakan yang dirumuskan tersebut harus sinergis dan berkesinambungan, sehingga diperlukan koordinasi yang matang diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya *good government* dan *clean governance* menjadi dasar Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> . Tujuan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah. 2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah. 3. Belum optimalnya kinerja pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaany a cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan birokrasi yang sudah tertata dengan baik 2. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Terjadinya hubungan yang harmonis

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip <i>good governance</i>.</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan</p>	Setda.	<p>di daerah berbeda-beda.</p> <p>2. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>3. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>4. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien</p>	<p>dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)</p> <p>4. Penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan</p>

Sumber: Setda Kabupaten Cilacap

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik

Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap mendukung pelaksanaan Misi ke-5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Sekretariat Daerah adalah Meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
- c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
- f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan	1. Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah. 2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan kebijakan	1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah. 2. Belum optimalnya manajemen ASN. 3. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang	1. Komitmen seluruh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	keuangan Kementerian Dalam Negeri; c. Meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Sekretariat Daerah adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi : a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan; b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur; c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi; d. Peningkatan kualitas pelayanan publik; e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan; f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.	daerah. 3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Setda.	pelaksanaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang tersusun secara sistematis dan akurat, berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4. Kurangnya pemahaman mengenai aturan dan kebijakan yang menghambat koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	2. Perkembangan Iptek yang pesat yang dapat dimanfaatkan untuk penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

3.4 TELAAHAN RENSTRA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH DAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan proses penyusunan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya potensi yang ada dalam suatu organisasi. Pemanfaatan potensi tersebut merupakan integrasi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusun, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap harus berjalan sinergis dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Rencana program pembangunan strategis dalam dokumen RPJMD (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap) harus terintegrasi dan memuat pokok-pokok pikiran yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Cilacap.

RPJMD adalah pedoman untuk menyusun rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan, indikasi program dan kegiatan setiap fungsi dan/ atau urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Jawa Tengah akan menjadi pedoman dalam penyusunan renstra Setda Provinsi Jawa Tengah. Demikian halnya RPJMD Kabupaten Cilacap juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selama 5 tahun ke depan. Adanya

keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan tersebut mengandung konsekuensi apabila RPJMD Kabupaten Cilacap disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, maka renstra Setda Kabupaten Cilacap juga selaras dan sinergis dengan renstra Setda Provinsi Jawa Tengah.

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 :
“Menjadi Institusi Terdepan Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Masyarakat Secara Profesional Dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar stakeholder.
2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap.
3. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar stakeholder.

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Meningkatnya tertib penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya tertib administrasi bidang pertanahan dan koordinasi pelaksanaan trantib;
4. Meningkatnya tertib administrasi penataan wilayah;
5. Meningkatnya kejelasan pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan dan pencapaian standar pelayanan minimal;
6. Meningkatnya kualitas LKPPD Provinsi Jawa Tengah dan kualitas EKPPD Kabupaten/ Kota dan pelaporan pemerintahan daerah;
7. Meningkatnya pengembangan kapasitas daerah;
8. Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
9. Meningkatnya tertib administrasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupa-ten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
11. Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel;
12. Meningkatnya tertib administrasi pengendalian pembangunan kab/kota;
13. Meningkatnya kualitas pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
14. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
15. Meningkatnya sinergitas dalam pelaksanaan promosi pembangunan pariwisata dan optimalisasi dalam mewujudkan infrastruktur perhubungan di daerah;

16. Meningkatnya sinergitas kebijakan dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD;
17. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian;
18. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
19. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
20. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana;
21. Meningkatnya siner gitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
22. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Penanggulangan kemiskinan;
23. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Agama, Kebudayaan dan Kesenian;
24. Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
25. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah;
26. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur;
27. Meningkatnya efektifitas dan efiseinsi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
28. Meningkatnya profesionalitas pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda;

29. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan pemerintah secara efektif dan efisien yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
30. Meningkatkan efektivitas publikasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan serta pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
31. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi yang optimal;
32. Meningkatkan kualitas analisis media dan informasi dalam rangka menciptakan pemberitaan yang obyektif dan berimbang serta bertanggung jawab;
33. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang rumah tangga cepat dan bertanggung jawab;
34. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pengelolaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas;
35. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan sandi dan telekomunikasi serta kearsipan di lingkungan Setda;
36. Meningkatkan, menyiapkan dan mengatur kegiatan acara protokoler pimpinan dan pelayanan tamu daerah.

3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, berbagai program strategis yang telah disusun dan direncanakan oleh masing-masing Bagian secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan tata ruang daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap. Namun demikian,

kebijakan-kebijakan strategis pembangunan khususnya dalam penetapan lokasi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cilacap, seperti kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sangat perlu diperhatikan agar para pelaku pembangunan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan, kebijakan program Ruang Hijau Terbuka (RTH), dan lain sebagainya.

Disamping itu, pemanfaatan tata ruang wilayah di Kabupaten Cilacap juga harus berjalan sinergis dengan memperhatikan pengaturan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029.

Dengan demikian renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang serta indikasi program yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cilacap sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan Setda Tahun 2017-2022 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Setda Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.				

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Setda Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dari seluruh fungsi dan urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit-unit kerja (Bagian). Isu strategis juga merangkum berbagai potensi yang secara strategis potensial untuk menjadi pokok-pokok strategi pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka perwujudan visi dan misi Sekretariat Daerah. Permasalahan dan potensi tersebut dapat berupa faktor yang berasal dari dalam lingkungan Sekretariat Daerah (internal) maupun faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Perda No. 23 Tahun 2008), permasalahan pokok yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Cilacap antara lain meliputi :

1. Tingginya angka kemiskinan.
2. Belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat.
3. Profesionalisme Aparatur belum sesuai kompetensinya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam.
5. Kondisi prasarana infrastruktur yang belum memadai.
6. Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan yang menyebabkan rawan bencana.
7. Lambannya upaya penegakan hukum.

Permasalahan/tantangan tersebut di atas, sejalan dengan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, yang meliputi 9 (sembilan) permasalahan pokok yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (Rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk). Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, gizi stunting, HIV AIDS, TB, dan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan lanjutan,
Tingginya kasus kekerasan gender disebabkan oleh masih kurangnya pendapatan perempuan, rata-rata sekolah pada perempuan yang masih relatif kurang.
Pengendalian penduduk masih menjadi permasalahan dilihat dari tingginya *unmetneed*, kesertaan KB aktif pada metode MKJP.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, efisien, efektif dan

- akuntabel. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya nilai akuntabilitas, masih ditemukan ASN yang tidak disiplin, masih terjadinya temuan inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah. Masih terjadinya usaha mikro yang belum dibina, koperasi tidak sehat masih tinggi, belum optimalnya pengelolaan inovasi pada ekonomi kreatif.
 4. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Pengangguran, terutama terkait dengan :
 - a. Masih tingginya angka pengangguran dan kesesuaian ketrampilan pencari kerja (Pencaker) tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia dalam bidang industri;
 - b. Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap tahun 2016 masih lebih besar daripada rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
 5. Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah. Kabupaten Cilacap berdasarkan struktur Pendapatan dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan masih bergantung pada dana perimbangan (DAU dan DAK).
 6. Masih ditemukannya kasus penyakit masyarakat. Angka kriminilitas masih ditemukan, kasus pencurian, penggunaan minuman keras dan narkoba.
 7. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, sumberdaya air, transportasi, perumahan pemukiman dan ruang terbuka hijau).
 8. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Masih ditemukannya pencemaran air, udara, dan lahan kritis. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan Metode 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*)
 9. Belum optimalnya pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan. Kabupaten Cilacap memiliki bencana yang cukup

lengkap, sampai dengan tahun 2016 telah disusun rencana penanggulangan bencana dan mitigasi bencana (masih ditemukannya bangunan bangunan di daerah rawan bencana). Sedangkan isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah tahun 2017-2022 antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Setda

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan oleh masing-masing Bagian diarahkan dan bersinergi untuk mengatasi isu strategis guna mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Cilacap.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap selama Tahun 2017 – 2022, adalah sebagai berikut:

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah **Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan serta harus memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran strategis Setda Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah

1. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah
2. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Setda

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai EKPPD	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9
		Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan peraturan perundangan	90	90	95	95	95
		Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah	Nilai AKIP	65	67	69	71	73
		Meningkatnya kinerja pelayanan Setda	nilai SKM	78	79	80	81	82

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi koordinasi.
2. Melibatkan partisipasi *stake holders*.
3. Meningkatkan pengendalian kegiatan.
4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan
6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Setda.

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi proses penyusunan kebijakan daerah.
2. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
3. Memprioritaskan program dan kegiatan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Sekretariat Daerah tercantum pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Visi : Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata (Bangga Mbangun Desa)				
Misi : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> .				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	1. Meningkatkan fungsi koordinasi. 2. Melibatkan partisipasi <i>stake holders</i> .	Optimalisasi proses penyusunan kebijakan daerah.
		Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah	1. Meningkatkan pengendalian kegiatan. 2. Mendorong peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan kegiatan.	Optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
		Meningkatnya kinerja pelayanan Setda	1. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan 2. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Setda	Memprioritaskan program dan kegiatan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Untuk melaksanakan berbagai bidang urusan pemerintahan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap menyusun 15 program prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah;
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
6. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Program Kehumasan dan Keprotokolan;
9. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda;
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
14. Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur;
15. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tercantum pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	1. Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan															9.269.000	Bagian Hukum			
					Persentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	1.600.000	100	1.432.865	100	445.000	100	470.000	100	500.000	100	535.000	100	4.982.865	Bagian Hukum	
				Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya lomba kadarkum, penyuluhan hukum, dan sosialisasi perda	keg	21	19	400.000	19	332.865	15	350.000	15	365.000	15	385.000	15	405.000	98	2.237.865	Bagian Hukum	
				Publikasi peraturan perundang-undangan	Tercetaknya Himpunan Lembaran Daerah, Himpunan Berita Daerah dan Himpunan Peraturan Pusat dan	buku	1300	1300	165.000	1300	85.000	1250	95.000	1250	105.000	1250	115.000	1250	130.000	760	695.000	Bagian Hukum	
					Terlaksananya Pertemuan Petugas JDI Hukum	kali	0	0		0		0		2		2		2		6			
Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	Terfasilitasinya pelaksanaan PATEN	kec	24	24	65.000	24	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48	165.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	
				Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa	Tersusunnya Perbup Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Cetak Buku	buku	0	100	60.000	100	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	90.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Up dating Data Analisis Jabatan	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran Data Analisis Jabatan	dokumen		30	100.000	10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40	200.000	Bagian Organisasi
				Penyempurnaan perumusan Standar Kompetensi Manajerial	Tersusunnya Perbup perumusan Standar Kompetensi Manajerial OPD	Perbup		10	100.000	10	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	175.000	Bagian Organisasi
				Pelaksanaan evaluasi dan up dating data ABK	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data ABK	dokumen		15	100.000	10	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	175.000	Bagian Organisasi
				Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan melalui pendampingan	dokumen		10	150.000	30	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40	288.000	Bagian Organisasi
				Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Proses pengadaan barang/jasa di desa	keg	0	4	150.000	4	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8	200.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap	org	0	250	100.000	250	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500	175.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan	Meminimalisasi terjadinya permasalahan dalam proses	keg	0	50	50.000	50	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80.000	Bagian Layanan Pengadaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
				Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	pengadaan barang / jasa																		
				Pembentukan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	Terlaksananya pengembangan budaya kerja Pemerintah Kabupaten Cilacap	keg	1	1	160.000	1	55.000	0	0	0	0	0	0	0	2	215.000	Bagian Organisasi		
						perangkat daerah/unit kerja	55	55		55		0		0		0		0		55			
				Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	Tersusunnya e-katalog lokal Kabupaten Cilacap	keg	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	Bagian Layanan Pengadaan		
				Penyusunan Nomenklatur dan uraian tugas jabatan	Terlaksananya Penyusunan Nomenklatur dan uraian tugas jabatan	dokumen	0	0	0	30	87.000	0	0						30	87.000	Bagian Organisasi		
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang kelembagaan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang kelembagaan	perangkat daerah/unit kerja	0	0	0	55	100.000	0	0	0	0	0	0	0	55	100.000	Bagian Organisasi		
					Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%	100	100	395.000	100	439.135	100	773.500	100	832.500	100	893.000	100	953.000	100	4.286.135	Bagian Hukum	
				Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan perda.	keg	30	30	140.000	30	130.000	31	136.500	6	145.000	6	153.000	6	160.000	109	864.500	Bagian Hukum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)		target	Rp (ribu)
				Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk-produk hukum daerah	kali	48	48	85.000	48	87.000	46	92.000	46	100.000	46	110.000	46	120.000	280	594.000	Bagian Hukum	
				Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Raperda tentang BUMD	Perda	2	2	80.000	2	85.000	0	0	0	0	0	0	0	4	165.000	Bagian Perekonomian		
				Public hearing Raperda/Raperbup	Terlaksananya public hearing	kali	6	6	90.000	9	137.135	8	150.000	8	165.000	8	180.000	8	195.000	47	917.135	Bagian Hukum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Rapat koordinasi hukum	Terlaksananya rakor hukum, penilaian Kab/Kota peduli HAM & desiminasi	kali	4	0	0	0	0	12	145.000	12	152.500	12	160.000	12	168.000	48	625.500	Bagian Hukum
				Penanganan Sengketa Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan pemberian bantuan	perkara	3	0	0	0	0	14	250.000	14	270.000	14	290.000	14	310.000	56	1.120.000	Bagian Hukum
				Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									1.225.000		1.310.000		1.320.000		1.455.000		5.310.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA
					Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	dok	24	21	0	4	0	5	200.000	5	180.000	5	140.000	5	140.000	45	660.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA
				Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Terfasilitasinya kerjasama daerah dan terselenggaranya rakor kerjasama daerah	keg	0	0	0	0	0	5	70.000	5	50.000	5	60.000	5	60.000	20	240.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA
				Rakor Kerjasama Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi kerjasama daerah	keg	0	0	0	0	0	1	80.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000	4	320.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA
				Penyusunan kajian potensi kerjasama daerah	Tersusunnya kajian potensi kerjasama daerah	dok	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	0	0	0	0	2	100.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab				
								2016	2017		2018		2019		2020		2021			2022		Target Akhir Renstra	
									targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
					Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai dengan ketentuan	%	n/a	n/a	0	12,5	0	25	385.000	37,5	320.000	50	360.000	62,5	395.000	62,5	1.460.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Survey dan pemetaan	Teridentifikasinya nama rupabumi di wilayah Kabupaten Cilacap	%	0	0	0	0	0	75	55.000	80	60.000	85	65.000	90	70.000	90	250.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
						dok	0	0	0	0	0	1		1		1		1		4			
				Penetapan dan penegasan batas wilayah	Tertatanya Batas Wilayah	kec	0	0	0	0	0	3	100.000	3	125.000	3	150.000	3	175.000	12	550.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Fasilitasi pembentukan kecamatan baru	Terfasilitasinya pembentukan kecamatan baru	kec	0	0	0	0	0	1	55.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	4	250.000	Fasilitasi pembentukan kecamatan baru	
				Penyusunan kajian penataan daerah	Tersusunnya kajian penataan daerah	dok	0	0	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Fasilitasi Pelaksanaan PATEN	Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	kec	0	0	0	0	0	24	75.000	24	75.000	24	80.000	24	80.000	96	310.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
					Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan	%	100	100	0	100	0	100	640.000	100	810.000	100	820.000	100	920.000	100	3.190.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non	keg	0	0	0	0	0	10	40.000	10	40.000	10	40.000	10	40.000	40	160.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab							
								2016	2017		2018		2019		2020		2021			2022		Target Akhir Renstra				
									targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)											
				pemerintah non departemen / luar negeri	departemen / luar negeri																					
				Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi aparat pemerintah di wilayah kecamatan	kecamatan	0	0	0	0	0	15	195.000	24	450.000	24	450.000	24	450.000	87	1.545.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA				
				Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lembaga Perangkat Daerah	keg	0	0	0	0	0	6	105.000	6	120.000	6	130.000	6	130.000	24	485.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA				
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Umum	keg	0	0	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	1	100.000	2	200.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA				
				Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPJ, LPPD dan EKPPD Tahun n-1 serta terlaksananya koordinasi penerapan SPM	dok	0	0	0	0	0	3	200.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000	12	800.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA				
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota									300.000		125.000		870.000		905.000		920.000		945.000		4.065.000	Bagian Administrasi Pembangunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab						
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra			
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)							
					Persentase penyerapan APBD	%	92,30	90,36	300.000	85	125.000	85	370.000	85	385.000	85	390.000	85	395.000	85	1.965.000	Bagian Administrasi Pembangunan		
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan bersumber APBD Kab. Cilacap	dok	1	1	300.000	1	125.000	1	130.000	1	135.000	1	140.000	1	145.000	6	975.000	Bagian Administrasi Pembangunan		
					Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD	dok	0	0	0	0	0	13	240.000	13	250.000	13	250.000	13	250.000	52	990.000	Bagian Administrasi Pembangunan		
						kali	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	16	0	Bagian Administrasi Pembangunan		
					Persentase OPD memiliki RKA dan DPA sesuai dengan dokumen RKPD dan APBD	%	100	100	0	100	0	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	1.600.000	Bagian Administrasi Pembangunan
					Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	keg	0	0	0	0	0	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	16	1.600.000	Bagian Administrasi Pembangunan		
					Persentase realisasi penyaluran hibah infrastruktur terhadap rekomendasi	%	43,08	68,15	0	85	0	85	100.000	85	120.000	85	130.000	85	150.000	85	500.000	Bagian Administrasi Pembangunan		
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Hibah)	dok	0	0	0	0	0	1	100.000	1	120.000	1	130.000	1	150.000	4	500.000	Bagian Administrasi Pembangunan		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)		target	Rp (ribu)
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya Rakor Kehumasan tingkat Kabupaten Cilacap	keg	0	0	0	0	2	130.000	2	140.000	2	120.000	2	160.000	8	550.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya alat dokumentasi	set	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pembinaan Keprotokol an	Terlaksananya Rakor Keprotokol an	keg	0	0	0	0	1	70.000	1	90.000	1	120.000	1	150.000	4	430.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Bimbingan Teknis Keprotokol an	Terlaksananya Bimtek Keprotokol an	org	0	0	0	0	50	125.000	50	130.000	50	135.000	50	140.000	200	530.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya PSL	stel	0	0	0	0	20	80.000	20	90.000	25	100.000	30	120.000	95	390.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pembinaan Aparatur Perangkat Daerah	Terlaksananya pembinaan bagi aparatur kehumasan	keg	0	0	0	0	1	75.000	1	90.000	1	110.000	1	125.000	4	400.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang kehumasan	bln	0	0	0	0	12	100.000	12	120.000	12	140.000	12	160.000	48	520.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpublikasinya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	bulan	0	0	0	0	12	175.000	18	250.000	24	300.000	32	375.000	86	1.100.000	Bagian Humas dan Protokol	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya	Tersedianya bahan-bahan publikasi indoor berupa baliho dan spanduk	jenis	0	0	0	0	2	100.000	2	120.000	2	150.000	2	180.000	8	550.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Analisis media dan informasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan analisis media dan informasi	keg	0	0	0	0	1	120.000	1	130.000	1	150.000	1	175.000	4	575.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pembuatan Kalender Pemkab	Tercetaknya Kalender Pemkab	keg	0	0	0	0	1	75.000	1	90.000	1	110.000	1	125.000	4	400.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Media Gathering	Meningkatnya kemitraan dengan media	keg	0	0	0	0	1	150.000	1	175.000	1	200.000	1	225.000	4	750.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu Gubernur/ Presiden/ Pusat	Terlaksananya pengamanan kunjungan kerja tamu gubernur/ Presiden/ Pusat	kegiatan	0	0	0	0	12	200.000	12	220.000	12	240.000	12	250.000	48	910.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan penerima tamu Bupati	Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan penerima tamu bupati	tahun	0	0	0	0	1	715.000	1	786.500	1	865.000	1	950.000	4	3.316.500	Bagian Humas dan Protokol	
				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	dok	1	1	300.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2	400.000		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah	dok	1	1	300.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2	400.000	Bagian Administrasi Pembangunan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
																				nan		
				Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya daftar rupabumi di tingkat Kecamatan (%)	%	60	62	65.000	70	180.000	0	0	0	0	0	0	0	70	245.000		
				Survey dan pemetaan	Teridentifikasinya nama rupabumi di wilayah Kabupaten Cilacap	%	60	62	65.000	70	50.000	0	0	0	0	0	0	0	70	115.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Penetapan dan penegasan batas wilayah	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas wilayah kec, kel / desa	kec	0	0	0	3	80.000	0	0	0	0	0	0	0	3	80.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Fasilitasi pembentukan kecamatan baru	Terfasilitasinya pembentukan kecamatan baru	kec	0	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Up date konten website milik Pemkab Cilacap (website Humas)	setiap hari (100%)	100	100	425.000	100	295.000	0	0	0	0	0	0	0	100	720.000		
				Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya layanan informasi berita Pemkab melalui website Humas	keg	1	1	150.000	1	75.000	0	0	0	0	0	0	0	2	225.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya Rakor Kehumasan tingkat Kabupaten Cilacap	keg	2	2	175.000	2	120.000	0	0	0	0	0	0	0	4	295.000	Bagian Humas dan Protokol	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya 1 set alat dokumentasi	keg	1	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Terinformasinya hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media masa	%	40	60	470.000	60	353.310	0	0	0	0	0	0	0	60	823.310		
				Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tercetaknya buku kumpulan sambutan Bupati Cilacap	buku	800	900	260.000	1000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1900	350.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpublikasinya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	keg	12	12	210.000	12	163.310	0	0	0	0	0	0	0	24	373.310	Bagian Humas dan Protokol	
				Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya	Tersedianya bahan publikasi indoor berupa baliho dan spanduk	unit	0	0	0	46	100.000	0	0	0	0	0	0	0	46	100.000	Bagian Humas dan Protokol	
				Program Pendidikan Masyarakat	Prosentase kegiatan pendidikan politik masyarakat	%	0	100	50.000	100	60.000	0	0	0	0	0	0	0	100	110.000		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfasilitasinya Pemilihan Umum / Kepala Daerah	keg	0	1	50.000	1	60.000	0	0	0	0	0	0	0	2	110.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Jumlah kasus non pidana yang diberikan bantuan hukum dan	kasus	3	5	120.000	14	220.000	0	0	0	0	0	0	0	19	340.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra		
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)	
				dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	pendampingan hukum																		
				dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	%	100	100	495.000	100	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100	995.000			
				Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya verifikasi RKA, DPA, SKTL dan DPPA OPD	%	100	100	400.000	100	400.000	0	0	0	0	0	0	0	100	800.000	Bagian Administrasi Pembangunan		
				Penanganan Sengketa Hukum	Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	kasus	3	5	120.000	14	220.000	0	0	0	0	0	0	0	19	340.000	Bagian Hukum		
				Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan	Terlaksananya rapat koordinasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap	keg	0	6	95.000	6	100.000	0	0	0	0	0	0	0	12	195.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA		
				Program Peningkatan Kerjasama Antar pemerintah daerah	Jumlah asosiasi lembaga kerjasama antar pemerintah daerah yang diikuti	keg	3	3	80.000	4	30.000	0	0	0	0	0	0	0	7	110.000			
				Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	keg	3	3	80.000	4	30.000	0	0	0	0	0	0	0	7	110.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
				pelayanan publik																			
		2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan daerah	Nilai AKIP Setda	Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						0		0		2.233.000		1.796.500		1.815.000		1.657.000		7.502.000	Bagian Organisasi
				Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan, standar operasional prosedur dan inovasi pelayanan publik	%	58	36	0	58	0	73	530.000	82	550.000	92	565.000	100	590.000	100	2.235.000	Bagian Organisasi		
				Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	perangkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	0	70	120.000	70	125.000	70	125.000	70	125.000	280	495.000	Bagian Organisasi		
				Terlaksananya pendampingan pelaksanaan sertifikasi, audit surveillance dan audit renewal sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada perangkat	perangkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	0	7	250.000	8	255.000	9	260.000	10	265.000	34	1.030.000	Bagian Organisasi		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab					
								2016	2017		2018		2019		2020		2021			2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)									
					daerah/ unit kerja penyelenggara layanan publik																			
					Terlaksananya penilaian, pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahun	peran gkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	39	110.000	39	120.000	53	130.000	108	150.000	239	510.000				
					Terlaksananya monev kinerja penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahun	peran gkat daerah/ unit kerja	0	0	0	55		55		55		55		265						
					Penyusunan Laporan Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Cilacap	peran gkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000	24	200.000			Bagian Organisasi	
					Persentase perangkat daerah/ unit kerja yang telah menetapkan jabatan ASN sesuai ANJAB, ABK, EVJAB dan standar kompetensi jabatan	%	100	50	0	60	0	70	570.000	80	325.000	90	345.000	100	130.000	100	1.370.000			Bagian Organisasi
					Penyusunan Evaluasi Jabatan	dok	0	0	0	0	25	140.000	0	0	0	0	0	0	25	140.000			Bagian Organisasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data ABK	Pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data ABK	dok	0	0	0	0	0	15	85.000	15	95.000	15	105.000	0	0	45	285.000	Bagian Organisasi	
				Penyusunan perumusan Standar Kompetensi	Terlaksana Workshop Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan serta tersusunnya Dokumen Perumusan Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan	Perbup	0	0	0	0	0	20	115.000	20	120.000	20	125.000	20	130.000	80	490.000	Bagian Organisasi	
				Pengembangan e-ANJAB	Tersedianya aplikasi Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial beserta pelatihannya	aplikasi	0	0	0	0	0	1	125.000	0	0	0	0	0	0	1	125.000	Bagian Organisasi	
				Pemutakhiran Data Analisis Jabatan	Terlaksananya Evaluasi dan Pemutakhiran Data Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Nomenklatur Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap	dok	0	0	0	0	0	15	105.000	15	110.000	15	115.000			45	330.000	Bagian Organisasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	
					Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang melaksanakan SKM	%	54	55	0	65	0	75	50.000	85	50.000	95	50.000	100	50.000	100	200.000	Bagian Organisasi
					Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Cilacap	perangkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	0	55	50.000	55	50.000	55	50.000	55	50.000	220	200.000	Bagian Organisasi
					Persentase ketersediaan koordinasi bidang organisasi sesuai kebutuhan	%	100	100	0	100	0	100	285.000	100	310.000	100	275.000	100	290.000	100	1.160.000	Bagian Organisasi
					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang kelembagaan	perangkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	0	55	105.000	55	110.000	55	115.000	55	120.000	220	450.000	Bagian Organisasi
					Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas	dok	0	0	0	0	0	2	40.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	8	190.000	Bagian Organisasi
					Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja	dok	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	0	0	0	0	2	100.000	Bagian Organisasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
					Kabupaten Cilacap																	
					Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi	bln	0	0	0	0	0	12	90.000	12	100.000	12	110.000	12	120.000	48	420.000	Bagian Organisasi
					Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	%	35	42	0	50	0	55	388.000	57,5	391.500	60	395.000	62,5	397.500	63	1.572.000	Bagian Organisasi
					Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	dok	0	0	0	0	0	2	130.000	2	132.500	2	135.000	2	137.500	8	535.000	Bagian Organisasi
						perangkat daerah/unit kerja	0	0	0	0	0	55		55		55		55		220		
					Terlaksananya Monev pengukuran capaian kinerja dan tersusunnya laporan capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP	kali	0	0	0	0	0	12	198.000	12	199.000	12	200.000	12	200.000	48	797.000	
						perangkat daerah/unit kerja	0	0	0	0	0	55		55		55		55		220		
					Terselenggaranya Bimtek Penyusunan LKjIP dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah/unit kerja	0	0	0	0	0	55	60.000	55	60.000	55	60.000	55	60.000	220	240.000	
					Persentase indikator kinerja program pada roadmap	%	100	100	0	100	0	100	160.000	100	170.000	100	185.000	100	200.000	100	715.000	Bagian Organisasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
					reformasi birokrasi yang tercapai																		
					Pengembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap	kegiatan	0	0	0	0	1	100.000	1	110.000	1	120.000	1	130.000	4	460.000			Bagian Organisasi
					Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap, peningkatan kapasitas RB, monev RB	perangkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	55		55		55		55		220				
					Pengembangan Budaya Kerja	keg	0	0	0	0	1	60.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000	4	255.000			Bagian Organisasi
					Pemerintah Kabupaten Cilacap	perangkat daerah/ unit kerja	0	0	0	0	55		55		55		55		220				
					Persentase perangkat daerah dengan SOTK yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	%	100	100	0	100	0	250.000	100	0	100	0	100	0	100	250.000			Bagian Organisasi
					Penyusunan Nomenklatur dan uraian tugas jabatan	dok	0	0	0	0	10	50.000	0	0	0	0	0	0	10	50.000			Bagian Organisasi
					Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	dok	0	0	0	0	10	200.000	0	0	0	0	0	0	10	200.000			Bagian Organisasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)
					perundang-undangan yang berlaku																		
				Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat																			
					Persentase perolehan prestasi bidang Kesra	%	3,12	6,25	0	9,4	0	9,4	951.800	9,4	1.043.480	9,4	1.143.828	9,4	1.253.711	9,4	4.392.819	Bagian Kesra	
				Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar	Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) umum dan Pelajar Tingkat Kabupaten dan Pengiriman MHQ, Juz Amma, MTQ umum dan Pelajar Tingkat Propinsi	keg	0	0	0	0	0	6	316.800	6	348.480	6	383.328	6	421.661	24	1.470.269	Bagian Kesra	
				Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran (MHQ)	Terlaksananya Musabaqoh Hafdzil Quran (MHQ)	keg	0	0	0	0	0	1	85.000	1	90.000	1	95.000	1	100.000	4	370.000	Bagian Kesra	
				Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan	Terselenggaranya Pekan Olahraga antar Perbatasan	keg	0	0	0	0	0	1	550.000	1	605.000	1	665.500	1	732.050	4	2.552.550	Bagian Kesra	
					Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti	%	80	80	0	80	0	80	50.000	80	50.000	80	55.000	80	60.500	80	215.500	Bagian Kesra	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos)	Terlaksananya Monitoring Hibah dan Bansos	bln	0	0	0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	55.000	12	60.500	48	215.500	Bagian Kesra
				Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan		%	100	100	0	100	0	100	2.850.566	100	3.126.123	100	3.429.235	100	3.762.658	100	13.168.582	Bagian Kesra
				Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	org	0	0	0	0	0	0	132.000	86	145.200	86	159.720	86	175.692	258	612.612	Bagian Kesra
				Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	bln	0	0	0	0	0	12	82.500	12	90.750	12	99.825	12	109.808	48	382.883	Bagian Kesra
				Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya kegiatan Amaliyah Romadhon, Festival Bedug dan Doa Akhir Tahun	keg	0	0	0	0	0	3	240.900	3	264.990	3	291.489	3	320.638	12	1.118.017	Bagian Kesra
				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Cilacap	keg	0	0	0	0	0	6	203.500	6	223.850	6	246.235	6	270.859	24	944.444	Bagian Kesra
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Jadi Kab Cilacap dan Peringatan HUT RI	keg	0	0	0	0	0	2	550.000	2	605.000	2	665.500	2	732.050	8	2.552.550	Bagian Kesra

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Keagamaan Maulud Nabi, Tahun Baru Hijriyah, Nuzulul Quran, Isra Miraj dan Pengajian Akbar	keg	0	0	0	0	0	5	324.500	5	356.950	5	392.645	5	431.910	20	1.506.005	Bagian Kesra
				Penyelenggaraan Ibadah Haji	Terselenggaranya BPIH TPHD/TKHD, Pelepasan Haji, Transportasi Haji dan Silaturahmi Haji	keg	0	0	0	0	0	4	1.222.166	4	1.344.383	4	1.478.821	4	1.626.703	16	5.672.072	Bagian Kesra
				Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	Terlaksananya pengiriman calon transmigran ke wilayah transmigrasi	kk	0	0	0	0	0	5	95.000	5	95.000	5	95.000	5	95.000	20	380.000	Bagian Kesra
				Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah									1.550.000		1.750.000		1.250.000		1.750.000		6.300.000	Bagian Perekonomian
					Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD	%	3,24	4,48	0	4,52	0	4,53	550.000	4,67	250.000	4,81	250.000	4,95	250.000	4,95	1.300.000	Bagian Perekonomian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				Kajian Kebijakan penanaman modal	Tersusunnya kajian tentang Analisis Potensi dan kelayakan Penanamana Modal Daerah kepada seluruh BUMD Kabupaten Cilacap.	dok	0	0	0	0	0	4	400.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	7	700.000	Bagian Perekonomian	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD	Terpantau dan terbinanya Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap serta terlaksananya Fit and Propertest Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang habis masa jabatannya	BUMD	0	0	0	0	0	6	150.000	6	150.000	6	150.000	6	150.000	24	600.000	Bagian Perekonomian	
					Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan	%	100	100	0	100	0	100	1.000.000	100	1.500.000	100	1.000.000	100	1.500.000	100	5.000.000	Bagian Perekonomian	
				Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya seminar dan capacity building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap	keg	0	0	0	0	0	2	175.000	2	175.000	2	175.000	2	175.000	8	700.000	Bagian Perekonomian	
				Pengembangan potensi unggulan daerah	Terselenggaranya Pameran Potensi Unggulan Daerah	keg	0	0	0	0	0	1	100.000	1	600.000	1	100.000	1	600.000	4	1.400.000	Bagian Perekonomian	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
				Fasilitasi Pasar Murah	Terselenggaranya kegiatan pasar murah yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Kabupaten Cilacap	keg	0	0	0	0	0	25	150.000	25	150.000	25	150.000	25	150.000	100	600.000	Bagian Perekonomian	
				Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi	Terbina dan terawasinya penyaluran peredaran pupuk, pestisida dan barang pokok penting lainnya di Wilayah Kabupaten Cilacap.	bln	0	0	0	0	0	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	48	600.000	Bagian Perekonomian	
				Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi bidang ekonomi	keg	0	0	0	0	0	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	48	400.000	Bagian Perekonomian	
				Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya pemberian informasi akses permodalan melalui program KUR	keg	0	0	0	0	0	2	75.000	2	75.000	2	75.000	2	75.000	8	300.000	Bagian Perekonomian	
				Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi di masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit Desa (BKD)	BKD / LKM	0	0	0	0	0	19	100.000	19	100.000	19	100.000	19	100.000	76	400.000	Bagian Perekonomian	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan pelaporan pelaksanaan	bln	0	0	0	0	0	12	150.000	12	150.000	12	150.000	12	150.000	48	600.000	Bagian Perekonomian	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)
				DBHCHT	kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Cilacap																		
				Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa							0	0	2.785.000	3.485.000	3.300.000	3.200.000						12.770.000	Bagian Layanan Pengadaan
					Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan	%	100	100	0	100	0	100	2.735.000	100	3.435.000	100	3.250.000	100	3.150.000	100		12.570.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemkab Cilacap.	bln	0	0	0	0	0	0	12	2.250.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	48	9.750.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Terlaksananya Pelatihan Sirup & Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemkab Cilacap	tahun	0	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Ja	Tersertifikasinya SDM dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa	orang	0	0	0	0	0	0	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	40	200.000	Bagian Layanan Pengadaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				sa																			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan	Tersedianya sarana prasarana untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa	unit	0	0	0	0	0	1	100.000	1	500.000	1	250.000	1	150.000	1	1.000.000	Bagian Layanan Pengadaan	
				Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa	Tersusunnya Perbup Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Cetak Buku	buku	0	0	0	0	0	100	30.000	100	30.000	100	50.000	100	50.000	400	160.000	Bagian Layanan Pengadaan	
				Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Tersosialisasinya peraturan pengadaan barang/jasa di desa	keg	0	0	0	0	0	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	350.000	Bagian Layanan Pengadaan	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersosialisasinya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa	org	0	0	0	0	0	250	75.000	250	75.000	250	100.000	250	100.000	1000	350.000	Bagian Layanan Pengadaan	
				Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan Barang/Jasa	keg	0	0	0	0	0	25	30.000	25	30.000	25	50.000	25	50.000	100	160.000	Bagian Layanan Pengadaan	
				Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap	Tersusunnya e-katalog lokal Kabupaten Cilacap	keg	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000	Bagian Layanan Pengadaan	
					Persentase ketersediaan koordinasi bidang	%	100	100	0	100	0	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	200.000	Bagian Layanan Pengadaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
							targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)								
					pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan																	
				Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	keg	0	0	0	0	8	50.000	8	50.000	8	50.000	8	50.000	32	200.000	Bagian Layanan Pengadaan	
				Program Pendidikan Non Formal	Persentase keikutsertaan peserta dalam kategori lomba MTQ Umum dan Pelajar	%	0	0	250.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	538.000		
				Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar	Terlaksananya MTQ Umum dan Pelajar	keg	1	2	250.000	2	288.000	0	0	0	0	0	0	0	4	538.000	Bagian Kesra	
				Program Pengembangan Data/Informatik Daerah	Laju inflasi	%		4,41	175.000	5	225.000	0	0	0	0	0	0	0	5	400.000		
				Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terfasilitasinya kegiatan pengendalian inflasi daerah	bln	12	12	175.000	12	155.000	0	0	0	0	0	0	0	24	330.000	Bagian Perekonomian	
				Updating dan rekapitulasi data statistik	Tersusunnya data monografi	kec	24	0	0	24	70.000	0	0	0	0	0	0	0	24	70.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Program Peningkatan Promosi dan	Meningkatnya promosi unggulan daerah	keg	31	26	150.000	25	715.000	0	0	0	0	0	0	0	51	865.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				Kerjasama Investasi																			
				Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Cilacap	keg	1	1	100.000	1	575.000	0	0	0	0	0	0	0	2	675.000	Bagian Perekonomian		
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Cilacap	keg	25	25	50.000	25	140.000	0	0	0	0	0	0	0	50	190.000	Bagian Perekonomian		
				Program Peningkatan Iklm Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Penyaluran Kredit untuk UMKM (%)	%	5	5	300.000	5	480.000	0	0	0	0	0	0	0	10	780.000			
				Kajian Kebijakan penanaman modal	Terlaksananya sebuah Kajian kebijakan penanaman modal bagi BUMD di Kabupaten Cilacap	dok	2	2	100.000	2	350.000	0	0	0	0	0	0	0	4	450.000	Bagian Perekonomian		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BUMD	BUM D	6	5	200.000	7	130.000	0	0	0	0	0	0	0	12	330.000	Bagian Perekonomian		
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa bagi pelaku usaha di bidang industri hasil	pelaku usaha	225	225	150.000	225	148.000	0	0	0	0	0	0	0	225	298.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Perdagangan	tembakau																	
				Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi	Terbina dan terawasinya penyaluran/peredaran barang dan jasa di bidang pupuk, pestisida dan LPG bersubsidi	bln	12	12	150.000	12	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	298.000	Bagian Perekonomian
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi rumah tangga miskin	RTM	140.934	140.934	355.000	140.934	265.000	0	0	0	0	0	0	0	140.934	620.000		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya penyaluran bantuan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran	bln	12	12	110.000	12	50.000	0	0	0	0	0	0	0	24	160.000	Bagian Kesra	
				Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	org	58	33	150.000	86	120.000	0	0	0	0	0	0	0	119	270.000	Bagian Kesra	
				Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan peserta transmigrasi	Terlaksananya pengiriman calon transmigran ke wilayah transmigrasi	kk	10	5	95.000	10	95.000	0	0	0	0	0	0	0	15	190.000	Bagian Kesra	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Perangkat daerah yang menyusun dokumen lakip, tapkin, RKT, IKU	unit kerja	67	67	80.000	55	197.000	0	0	0	0	0	0	0	55	277.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen LAKIP dan Tapkin	dok	2	2	125.000	2	127.000	0	0	0	0	0	0	0	4	252.000			
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKjIP dan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun	dokumen	2	2	125.000	2	127.000	0	0	0	0	0	0	0	2	252.000	Bagian Organisasi		
					perangkat daerah/unit kerja	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55					
				Monitoring dan evaluasi capaian kinerja OPD melalui aplikasi e-SAKIP	Terlaksananya Monev capaian kinerja dan tersusunnya laporan kinerja melalui aplikasi e-SAKIP	aplikasi	1	1	80.000	1	197.000	0	0	0	0	0	0	0	1	277.000	Bagian Organisasi		
						perangkat daerah/unit kerja	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55				
				Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	Prestasi olahraga ranking Porsenitas	ranking		5	544.000	4	555.000	0	0	0	0	0	0	0	4	1.099.000			
					Jumlah kompetisi olahraga tingkat Kabupaten	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	keg	1	1	44.000	1	55.000	0	0	0	0	0	0	0	2	99.000	Bagian Umum		
				Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan	Porseni antar daerah perbatasan (Kunci Bersama)	keg	1	1	500.000	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000	Bagian Kesra		
				Program Perencanaan	Dokumen LPPD, EKPPD dan LKPJ	dok	2	2	260.000	2	250.000	0	0	0	0	0	0	0	4	510.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)		target	Rp (ribu)
				Pembangunan Daerah	Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPM, SP, SOP)	dok	3	3	250.000	3	195.000	0	0	0	0	0	0	0	6	445.000		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (% IKM)	point	87	78,49	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0		
				Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	Terlaksananya rapat koordinasi unit penyelenggara pelayanan publik, fasilitasi input dan pemutakhiran data Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan fasilitasi keikutsertaan unit penyelenggara dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	keg	1	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000	Bagian Organisasi	
						perangkat daerah/unit kerja	67	53		53		0	0	0	0	0	0	0	53			
				Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Buku LPPD dan EKPPD Tahun 2017	dok	1	1	95.000	1	90.000	0	0	0	0	0	0	0	2	185.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Buku LKPJ Tahun 2017	dok	1	2	95.000	1	90.000	0	0	0	0	0	0	0	3	185.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA	
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Terlaksananya penilaian, pemeringkatan dan money	perangkat daerah/h/	24	38	150.000	38	95.000	0	0	0	0	0	0	0	76	245.000	Bagian Organisasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)		target	Rp (ribu)
				n pelayanan publik	kinerja penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahun	unit kerja penilaian																
						perangkat daerah/h/unit kerja monev	67	53											106			
				Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya dokumen Renja dan Renstra Setda	dok	0	0	0	2	30.000	0	0	0	0	0	0	0	2	30.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
				Pengembangan sistem aplikasi penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Setda	Tersusunnya Renja dan Evaluasi Renja Setda	aplikasi	0	1	70.000	1	40.000	0	0	0	0	0	0	0	2	110.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Audit ISO 9001:2008	SKPD	5	5	300.000	6	243.400	0	0	0	0	0	0	0	11	543.400		
					Ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup No.98 Tahun 2012 (% terhadap target yg ditetapkan SPM)	%	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
				Survey Kepuasan Pelayanan Publik	Terlaksananya pendampingan penerapan, Sertifikasi, Audit Surveillance dan Audit Renewall Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada perangkat	perangkat daerah/h/unit kerja	5	5	300.000	6	243.400	0	0	0	0	0	0	0	11	543.400	Bagian Organisasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab						
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra					
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)											
					daerah/ unit kerja penyelenggara pelayanan publik																					
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dikembangkan (%)	%	35	35	175.000	35	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	445.000	
					Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Terlaksananya pemberian informasi Akses Permodalan Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM	keg	1	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000	Bagian Perekonomian	
					Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Terpantau dan Terbinanya Lembaga Ekonomi di Masyarakat, Penyaluran Ekonomi Lokal Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit Desa (BKD)	BKD / LKM	19	19	75.000	19	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	165.000	Bagian Perekonomian	
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DBHCHT, pengembangan perekonomian dan sumber daya alam di Kabupaten Cilacap	bln	12	12	100.000	12	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	230.000	Bagian Perekonomian	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan keagamaan	keg		17	1.910.000	17	1.810.060	0	0	0	0	0	0	0	34	3.720.060			
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Upacara HUT RI	keg	1	1	400.000	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2	900.000			
				Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan Amaliyah Romadhon dan Doa bersama menyambut Tahun Baru H	keg		12	83.000	3	219.000	0	0	0	0	0	0	15	302.000	Bagian Kesra			
				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional	keg	7	5	434.000	5	185.000	0	0	0	0	0	0	10	619.000	Bagian Kesra			
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya peringatan Hari Jadi ke-162 dan HUT RI ke-73 di Kabupaten Cilacap dengan tertib, aman, lancar dan meriah	keg	0	2	400.000	2	500.000	0	0	0	0	0	0	4	900.000	Bagian Kesra			
				Peringatan Hari-hari Besar Agama	Terlaksananya kegiatan Pengajian Akbar, Isra Miraj, Tahun Baru Hijriyah, Maulud Nabi dan Nuzulul Quran	keg	5	5	384.000	5	295.000	0	0	0	0	0	0	10	679.000	Bagian Kesra			
				Penyelenggaraan Ibadah Haji	Terlaksananya Transportasi Haji, Silaturahmi, pelepasan dan BPIH	keg	6	8	1.009.000	4	1.111.060	0	0	0	0	0	0	12	2.120.060	Bagian Kesra			
	3. Meningkatnya	Rata-rata nilai SKM Setda	Program Pelayanan Administrasi	Ketersediaan administrasi perkantoran		bulan	12	12	15.040.500	12	10.353.144	12	9.937.520	12	10.855.772	12	11.937.049	12	12.954.604	72	71.078.589	Bagian Umum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
		kinerja pelayanan Setda		si Perkantoran	setiap bulan																		
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	bln	12	12	117.000	12	69.000	12	77.500	12	85.000	12	93.500	12	102.000	72	544.000	Bagian Umum (Gabungan)	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan, telepon, listrik, air, surat kabar & majalah	bln	12	12	2.041.000	12	1.593.200	12	1.752.520	12	1.927.772	12	2.120.549	12	2.332.604	72	11.767.645	Bagian Umum	
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya premi barang milik daerah	bln	12	12	115.000	12	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	205.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honorarium PNS dan Non PNS	bln	12	12	1.700.000	12	1.042.344	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2.742.344	Bagian Keuangan dan Aset (Gabungan)	
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bln	12	12	340.000	12	300.000	12	330.000	12	363.000	12	400.000	12	440.000	72	2.173.000	Bagian Umum (Gabungan)	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bln	12	12	270.000	12	270.000	12	300.000	12	330.000	12	363.000	12	400.000	72	1.933.000	Bagian Umum (Gabungan)	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	paket	1	1	110.000	1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	2	310.000	Bagian Keuangan dan Aset		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	bln	12	12	1.670.000	12	1.775.000	12	1.952.500	12	2.150.000	12	2.365.000	12	2.600.000	72	12.512.500	Bagian Umum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)								
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman harian, rapat, tamu dan akomodasi tamu	bln	12	12	3.392.500	12	2.468.600	12	2.715.000	12	2.930.000	12	3.220.000	12	3.500.000	72	18.226.100	Bagian Umum (Gabungan)	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bln	12	12	5.200.000	12	2.500.000	12	2.750.000	12	3.000.000	12	3.300.000	12	3.500.000	72	20.250.000	Bagian Umum	
				Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD Setda)	Tersedianya Laporan Realisasi Belanja Masing-Masing Bagian Sebagai Pengendalian Kegiatan	bln	12	12	85.000	12	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	130.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	Tersedianya data dan tata kelola arsip Sekretariat Daerah Kab. Cilacap	keg	0	0	0	0	0	1	60.000	1	70.000	1	75.000	1	80.000	4	285.000	Bagian Umum	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	5.950.000	100	4.830.100	100	2.200.000	100	2.400.000	100	2.600.000	100	2.800.000	100	20.780.100	Bagian Umum	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor	bln	12	12	825.000	12	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1.220.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Pengadaan Lambang Negara (Bendera dan Lios)	Tercukupinya kebutuhan Lambang Negara (Bendera dan Lios)	bln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Keuangan dan Aset
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya dan tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan	bln	12	12	300.000	12	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	469.000	Bagian Keuangan dan Aset	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
					siap pakai																		
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharannya Gedung Kantor	bln	12	12	1.100.000	12	870.000	0	0	0	0	0	0	0	24	1.970.000	Bagian Keuangan dan Aset		
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	bln	12	12	2.350.000	12	2.000.000	12	2.200.000	12	2.400.000	12	2.600.000	12	2.800.000	72	14.350.000	Bagian Umum	
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Peralatan Kantor	bln	12	12	875.000	12	650.000	0	0	0	0	0	0	0	24	1.525.000	Bagian Keuangan dan Aset (Gabungan)		
				Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif	bln	12	12	500.000	12	500.000	0	0	0	0	0	0	0	24	1.000.000	Bagian Keuangan dan Aset		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagian Layanan Pengadaan	Tersedianya sarana prasarana untuk Proses Pengadaan Barang/Jasa	unit	0	0	0	1	246.100	0	0	0	0	0	0	0	1	246.100	Bagian Layanan Pengadaan		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin pegawai yang sesuai ketentuan	%	100	100	135.000	100	111.000	100	122.000	100	135.000	100	148.000	100	162.000	100	813.000	Bagian Umum	
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas Setda	stel	0	65	100.000	250	91.000	250	100.000	250	110.000	250	121.000	250	132.000	1315	654.000	Bagian Umum	
				Up dating data Simpeg dan absensi pegawai	Terlaksananya rakor Updating data simpeg dan absensi pegawai Setda	keg	2	2	35.000	2	20.000	2	22.000	2	25.000	2	27.000	2	30.000	12	159.000	Bagian Umum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Setda																		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai Setda yang mengikuti diklat/bimtek/seminar dan sejenisnya	%	n/a	7	5.385.000	13	2.845.500	15	120.000	15	140.000	20	170.000	20	175.000	20	8.835.500	Bagian Umum
				Pendidikan dan pelatihan formal	Terkirimnya peserta diklat teknis fungsional/bimtek/workshop/seminar	org		5	375.000	25	50.000	10	60.000	30	75.000	40	100.000	40	100.000	150	760.000	Bagian Umum
				Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan APBD	tersusunnya buku laporan bulanan seluruh kegiatan pembangunan	buku	130	130	300.000	130	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260	535.000	Bagian Administrasi Pembangunan
					terselenggaranya koordinasi pelaksanaan pembangunan	kali	4	4		4		0		0		0		0		8		
				Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	bln	12	12	4.000.000	12	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6.000.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Rapat koordinasi hukum	Terlaksananya rakor hukum	kali	4	4	175.000	4	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8	312.000	Bagian Hukum
				Bimbingan Teknis Keprotokol an	Terlaksananya Bimtek Kehumasan/Keprotokol an	org	1	1	85.000	50	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	210.000	Bagian Humas dan Protokol
				Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Terlaksananya pelatihan SIRUP	keg	0	2	100.000	2	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	150.000	Bagian Layanan Pengadaan
				Bimbingan Teknis Penyusunan LKjIP dan	Terselenggaranya Bimtek Penyusunan LKjIP dan	perangkat daerah/h/	55	55	100.000	55	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55	155.000	Bagian Organisasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)
				Dokumen Kinerja	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	unit kerja																	
				Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap	Terlaksananya pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap	kegiatan	1	1	100.000	1	30.000	0	0	0	0	0	0	2	130.000	Bagian Organisasi			
				Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap	perangkat daerah/unit kerja	55	55		55		0	0	0	0	0	0	55		Bagian Layanan Pengadaan			
				Pembinaan Keprotokol an	Terlaksananya Rakor Keprotokol an	org	0	10	100.000	30	125.000	0	0	0	0	0	0	40	225.000	Bagian Humas dan Protokol			
				Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap	keg	0	2	50.000	4	38.500	0	0	0	0	0	0	6	88.500	Bagian Umum			
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		bulan	0	0	0	0	0	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	48	270.000		
									4.880.000		4.708.800		4.360000		4.790.000		5.230.000		5.650.000		29.618.800		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	
					Persentase kebutuhan Kepala Daerah yang terlayani sesuai standar	%	100	100	4.820.000	100	4.628.800	100	4.280.000	100	4.710.000	100	5.150.000	100	5.570.000	100	29.158.800	Bagian Umum
				Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	keg	15	12	45.000	10	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22	125.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA
				Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terselenggaranya pembinaan aparat pemerintah daerah di kecamatan	wilayah	24	13	150.000	11	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	300.000	Bagian Pemerintahan dan OTDA
				Pelayanan Administrasi Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kepala daerah yang sesuai standar	bln	12	12	2.250.000	12	2.354.000	12	2.500.000	12	2.750.000	12	3.000.000	12	3.300.000	72	16.154.000	Bagian Umum
				Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan wakil kepala daerah yang sesuai standar	bln	12	12	1.750.000	12	1.327.800	12	1.450.000	12	1.600.000	12	1.760.000	12	1.850.000	72	9.737.800	Bagian Umum
				Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli	Tersusunnya Telaahan Kebijakan Bupati dalam bentuk Kajian Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber	telaahan		9	200.000	9	300.000	9	330.000	9	360.000	9	390.000	9	420.000	54	2.000.000	Bagian Umum

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)								
					Daya Manusia																		
				Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pembinaan bidang Kesejahteraan Rakyat	bln	12	12	50.000	12	75.000	0	0	0	0	0	0	0	24	125.000	Bagian Kesra		
				Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang perekonomian dibawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	bln	12	12	50.000	12	100.000	0	0	0	0	0	0	0	24	150.000	Bagian Perekonomian		
				Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi, tata laksana dan kinerja pemda	Terlaksananya pembinaan bidang organisasi, tatalaksana dan kinerja pemda	bln	12	12	110.000	12	80.000	0	0	0	0	0	0	0	24	190.000	Bagian Organisasi		
				Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang kehumasan	bln	12	12	40.000	12	77.000	0	0	0	0	0	0	0	24	117.000	Bagian Humas dan Protokol		
				Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan	Terciptanya ketertiban tamu Bupati, Wabup dan Pejabat di lingkungan Setda serta tersusunnya naskah sambutan Bupati, Wabup dan Sekda	bln	12	12	135.000	12	45.000	0	0	0	0	0	0	0	24	180.000	Bagian Humas dan Protokol		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang keuangan dan aset	bln	12	12	40.000	12	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24	80.000	Bagian Keuangan dan Aset
					Persentase kinerja perangkat daerah di bidang pembangunan sesuai dengan target fisik yang direncanakan	%	97,24	99,20	60.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	460.000	Bagian Administrasi Pembangunan
				Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang Pembangunan	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi perangkat daerah di bidang Pembangunan	kegiatan	12	12	60.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	72	460.000	Bagian Administrasi Pembangunan
				Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda				0		0		5.484.900		4.596.940		4.979.334		4.610.672		19.671.846		
					Persentase penyerapan anggaran Setda	%	86,19	88,01	0	85	0	85	1.370.000	85	1.375.000	85	1.495.000	85	1.500.000	85	5.740.000	Bagian Keuangan dan Aset
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya belanja jasa administrasi keuangan	bln			0	0	0	12	1.100.000	12	1.100.000	12	1.200.000	12	1.200.000	48	4.600.000	Bagian Keuangan dan Aset (Gabungan)
				Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (Setda)	Tersedianya Laporan Realisasi Belanja masing-masing bagian sebagai pengendali kegiatan	bln			0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	60.000	12	60.000	48	220.000	Bagian Keuangan dan Aset

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et		Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)
				Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset	Terlaksananya Pembinaan dan koordinasi Bidang Keuangan dan Aset	bln			0	0	0	12	45.000	12	45.000	12	50.000	12	50.000	48	190.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Bintek Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Setda	keg			0	0	0	2	25.000	2	30.000	2	35.000	2	40.000	8	130.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	Terlaksananya Bimtek Pengelola Administrasi Keuangan	orang			0	0	0	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	100.000	320	400.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Bulanan Setda	Tersedianya Laporan Realisasi Belanja masing-masing bagian sebagai pengendali kegiatan	bln			0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	48	200.000	Bagian Keuangan dan Aset	
					Persentase aset Setda dalam kondisi baik	%	99,89	99,7	0	100	0	100	4.114.900	100	3.221.940	100	3.484.334	100	3.110.672	100	13.931.846	Bagian Keuangan dan Aset	
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan roda empat milik Pemda Kabupaten Cilacap	kendaraan			0	0	0	14	100.000	14	110.000	14	120.000	14	130.000	56	460.000	Bagian Keuangan dan Aset	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya instalasi listrik bangunan kantor	paket			0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000	Bagian Keuangan dan Aset	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya Perlengkapan Gedung Kantor	paket			0	0	0	4	434.500	4	477.950	4	525.745	4	52.575	16	1.490.770	Bagian Keuangan dan Aset
				Pengadaan Lambang Negara (Bendera dan Lios)	Tercukupinya Sarana Prasarana Aparatur	jenis			0	0	0	2	45.000	0	0	2	50.000	0	0	4	95.000	Bagian Keuangan dan Aset
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	paket			0	0	0	2	185.900	2	204.490	2	224.939	2	247.433	8	862.762	Bagian Keuangan dan Aset
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	bln			0	0	0	12	957.000	12	965.000	12	970.000	12	975.000	48	3.867.000	Bagian Keuangan dan Aset
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	bln			0	0	0	12	715.000	12	786.500	12	865.150	12	951.665	48	3.318.315	Bagian Keuangan dan Aset (Gabungan)
				Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di lingkungan Setda Kabupaten Cilacap	paket			0	0	0	3	1.600.000	1	600.000	1	650.000	1	675.000	6	3.525.000	Bagian Keuangan dan Aset
				Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	keg			0	0	0	3	27.500	3	28.000	3	28.500	3	29.000	12	113.000	Bagian Keuangan dan Aset
				Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Terpenuhiya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	0	100	0	100	20.000	100	90.000	100	40.000	100	50.000	100	200.000	Bagian Administrasi Pembangunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)	targ et	Rp (ribu)		targ et	Rp (ribu)
				Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya Rencana Kerja Setda tahun n+1 dan Renstra Setda tahun 2022-2027	dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30.000	2	30.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
				Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Setda tahun n+1 dan Renja Setda Perubahan Tahun n	dok	0	0	0	0	2	20.000	2	20.000	2	20.000	0	0	6	60.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
				Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi Renstra Setda	dok	0	0	0	0	0	0	1	50.000	0	0	0	0	1	50.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
				Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP	Tersusunnya dokumen Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP Setda	dok	0	0	0	0	0	0	1	20.000	1	20.000	0	0	3	60.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Tertib penyimpanan dokumen/arsip	dok	1	1	100.000	1	55.000	0	0	0	0	0	0	0	2	155.000		
				Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	Tersedianya data dan tata kelola arsip Sekretariat Daerah Kab. Cilacap	keg	1	1	100.000	1	55.000	0	0	0	0	0	0	0	2	155.000	Bagian Umum	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Laporan keuangan dan Laporan mutasi barang	dok	2	2	210.000	2	150.000	0	0	0	0	0	0	0	4	360.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
								2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target		Rp (ribu)	target	Rp (ribu)
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Setda	keg	3	3	150.000	3	25.000	0	0	0	0	0	0	0	6	175.000	Bagian Keuangan dan Aset		
				Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Mutasi Barang SKPD Setda	keg	3	3	60.000	3	25.000	0	0	0	0	0	0	0	6	85.000	Bagian Keuangan dan Aset		
				Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan	Meningkatan SDM	keg	2	0	0	2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000	Bagian Keuangan dan Aset		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 merupakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2017)	Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan	12	12	12	12	12	12	72
2	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat disiplin pegawai yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pegawai Setda yang mengikuti diklat/bimtek/seminar dan sejenisnya	7,00	13,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00

5	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kebutuhan Kepala Daerah yang terlayani sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kinerja SKPD di bidang pembangunan sesuai dengan target fisik yang direncanakan	99,20	100	100	100	100	100	100
8	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyerapan APBD	90,36	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
11	Persentase OPD memiliki RKA dan DPA sesuai dengan dokumen RKPD dan APBD	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase realisasi penyaluran hibah infrastruktur terhadap rekomendasi	68,15	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
13	Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan, standar operasional prosedur dan inovasi pelayanan publik	36	58	73	82	92	100	100

14	Persentase perangkat daerah/ unit kerja yang telah menetapkan jabatan ASN sesuai ANJAB, ABK, EVJAB dan standar kompetensi jabatan	50	60	70	80	90	100	100
15	Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang melaksanakan SKM	55	65	75	85	95	100	100
16	Persentase ketersediaan koordinasi bidang organisasi sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	42	50	55	57,5	60	62,5	62,5
18	Persentase indikator kinerja program pada roadmap reformasi birokrasi yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase perangkat daerah dengan SOTK yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase perolehan prestasi bidang Kesra	6,25	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
22	Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti	80	80	80	80	80	80	80

23	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	21	4	5	5	5	5	45
24	Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai dengan ketentuan	n/a	12,5	25	37,5	50	62,5	62,5
25	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
26	Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD	4,48	4,52	4,53	4,67	4,81	4,95	4,95
27	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
28	Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
30	Persentase penyerapan anggaran Setda	88,01	85	85	85	85	85	85
31	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	99,70	100	100	100	100	100	100
32	Persentase naskah kehumasan yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100
33	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100
34	Nilai EKPPD	2,5 (tinggi)	2,6 (tinggi)	2,6 (tinggi)	2,7 (tinggi)	2,8 (tinggi)	2,9 (tinggi)	2,9 (tinggi)

35	Tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan peraturan perundangan-undangan	n/a	90	90	95	95	95	95
36	Nilai AKIP Setda	52,00	55,00	57,00	60,00	62,00	65,00	65,00
37	Nilai rata-rata SKM Setda	78,49	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga cita-cita **“CILACAP SEJAHTERA SECARA MERATA (BANGGA MBANGUN DESA)”** dapat tercapai.

BUPATI CILACAP,

TATWA SUWANTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 94